

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

Jl. Raya Ir. H. Juanda No. 85
Sidoarjo - Jawa Timur
Telp. 0318665369 Fax. 0318665369
e-mail : surabaya@dilmil-surabaya.go.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desembers 2024

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Raya Ir. H. Juanda No. 85

Telp. 0318665369 Fax. 0318665369

Sidoarjo - Jawa Timur

e-mail : surabaya@dilmil-surabaya.go.id


KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah salah satu Entitas Akuntansi di yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sidoarjo, 31 Desember 2024
Sekretaris
Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Eirida Nuril Hanifah, S.Si., M.PSDM.
NIP. 197804082006042001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	viii
RINGKASAN	ix
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	xi
NERACA	xii
LAPORAN OPERASIONAL	xiii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	xiv
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
A. PENJELASAN UMUM	1
A.1. Dasar Hukum	1
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Militer III-12 Surabaya	2
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	3
A.4. Basis Akuntansi	4
A.5. Dasar Pengukuran.....	4
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	12
B.1 Pendapatan	12
B.2 Belanja.....	13
B.3 Belanja Pegawai	15
B.4 Belanja Barang	17
B.5 Belanja Modal	17
B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18
B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	18
B.5.3 Belanja Modal Lainnya	19
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	20

C.1. Aset Lancar	20
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran.....	20
C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas	20
C.1.3. Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)	21
C.1.4. Piutang Bukan Pajak.....	21
C.1.5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	21
C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	22
C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	22
C.1.8. Persediaan.....	22
C.2. Aset Tetap	23
C.2.1. Tanah.....	23
C.2.2. Peralatan dan Mesin	25
C.2.3. Gedung dan Bangunan.....	25
C.2.4. Aset Tetap Lainnya	26
C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan	27
C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	27
C.3. Aset Lainnya	28
C.3.1. Aset Tak Berwujud	28
C.3.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	28
C.3.3. Aset Lain–Lain	29
C.3.4. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	29
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	30
C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga	30
C.4.2. Utang yang Belum Ditagihkan.....	31
C.4.3. Hibah yang Belum Disahkan.....	31
C.4.4. Pendapatan Diterima di Muka	31
C.4.5. Uang Muka dari KPPN	32
C.4.6. Utang Jangka Pendek Lainnya.....	32

C.5 Ekuitas	32
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	33
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	33
D.2 Beban Pegawai.....	33
D.3 Beban Persediaan	34
D.4 Beban Barang dan Jasa	35
D.5 Beban Pemeliharaan.....	36
D.6 Beban Perjalanan Dinas	36
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	37
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	38
D.9 Kegiatan Non Operasional	38
D.10 Pos Luar Biasa	39
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	40
E.1 Ekuitas Awal	40
E.2 Surplus/Defisit LO.....	40
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi.....	40
E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset	40
E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan	40
E.4.3 Koreksi atas Reklasifikasi.....	40
E.4.4 Selisih Revaluasi Aset	41
E.4.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi.....	41
E.4.6 Koreksi Lain-lain	41
E.5 Transaksi Antar Entitas.....	41
E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	42
E.5.2 Transfer Keluar dan Transfer Masuk	42
E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung	42
E.6 Ekuitas Akhir	43
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	44

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	44
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.....	44
F.3. Pengungkapan Lain-Lain.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan..... 12

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBPN Per 31 Desember 2024 dan 2023 13

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2024..... 13

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023 15

Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 2023 16

Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2024 dan 2023 17

Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal Per 31 Desember 2024 dan 2023..... 18

Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024 dan 2023..... 18

Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan 2023..... 19

Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 19

Tabel 11. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember Tahun 2023 20

Tabel 12. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember Tahun 2023..... 20

Tabel 13. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember Tahun 2023 21

Tabel 14. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2024..... 22

Tabel 15. Rincian Persediaan..... 23

Tabel 16. Mutasi Transaksi Tanah..... 233

Tabel 17. Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2024..... 24

Tabel 18. Mutasi Transaksi Peralatan dan Mesin 25

Tabel 19. Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan..... 26

Tabel 20. Mutasi Aset Tetap Lainnya 26

Tabel 21. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan 27

Tabel 22. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap..... 27

Tabel 23. Mutasi Aset Tak Berwujud 28

Tabel 24. Mutasi Aset Lain-Lain 29

Tabel 25. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya..... 30

Tabel 26. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga..... 30

Tabel 27. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka 31

Tabel 28. Perbandingan Rincian Pendapatan Per 31 Desember 2024 dan 2023 33

Tabel 29. Perbandingan Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 2023..... 34

<i>Tabel 30. Perbandingan Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023.....</i>	35
<i>Tabel 31. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan 2023.....</i>	35
<i>Tabel 32. Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2024 dan 2023</i>	36
<i>Tabel 33. Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2024 dan 2023.....</i>	37
<i>Tabel 34. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2024 dan 2023</i>	37
<i>Tabel 35. Rincian Beban Piutang tak Tertagih Per 31 Desember 2024 dan 2023</i>	38
<i>Tabel 36. Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2024 dan 2023</i>	38
<i>Tabel 37. Rincian Koreksi Lainnya</i>	41
<i>Tabel 38. Rincian Transaksi Antar Entitas.....</i>	42
<i>Tabel 39. Rincian Transfer Keluar.....</i>	42
<i>Tabel 40. Rincian Transfer Masuk.....</i>	42

Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Jl. Ir. Juanda No. 85 Sidoarjo

Telp : 031-8665369 e-mail: surabaya@dilmil-surabaya.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2024 yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sidoarjo, 31 Desember 2024

Sekretaris

Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Firda Nuri Hanifah, S.Si., M.PSDM.

NIP. 197804082006042001

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024. Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.000.000,00.

Realisasi Belanja Negara Tahun 2024 adalah sebesar Rp4.690.624.829,00 atau mencapai 96,32% dari alokasi anggaran sebesar Rp4.869.715.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp65.506.809.250,00, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp0,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp65.506.809.250,00; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp6.363.194,00 dan Rp65.500.446.056,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.291.667,00, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp4.885.082.432,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp4.882.790.765,00). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos- Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar (Rp4.882.790.765,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp65.696.592.742,00 dikurangi defisit-LO sebesar (Rp4.882.790.765,00), ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar Rp1.019.250,00, kemudian ditambah dengan koreksi lain-lain sebesar Rp0,00 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4.685.624.829,00 sehingga Ekuitas akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp65.500.446.056,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024			TA 2023		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN	B.1						
Pendapatan	B.1	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Jumlah Pendapatan		0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
BELANJA	B.2						
Belanja Pegawai	B.3	3.379.769.000,00	3.213.565.581,00	95	3.052.602.000,00	2.977.030.923,00	98
Belanja Barang	B.4	1.471.964.000,00	1.459.499.248,00	99	1.448.414.000,00	1.438.214.590,00	99
Belanja Modal	B.5	17.982.000,00	17.560.000,00	98	40.000.000,00	39.985.000,00	100
Jumlah Belanja		4.869.715.000,00	4.690.624.829,00	96	4.541.016.000,00	4.455.230.513,00	98

NERACA

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
ASET			
Aset Lancar	C. 1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.1	0,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C. 1.2	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C. 1.3	0,00	0,00
Piutang Bukan Pajak	C. 1.4	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C. 1.5	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 1.6	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C. 1.7	0,00	0,00
Persediaan	C. 1.8	0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		0,00	0,00
Aset Tetap	C. 2		
Tanah	C. 2.1	61.585.708.259,00	61.585.708.259,00
Peralatan dan Mesin	C. 2.2	3.665.182.729,00	3.644.673.409,00
Gedung dan Bangunan	C. 2.3	4.457.653.000,00	4.457.653.000,00
Aset Tetap Lainnya	C. 2.4	190.000,00	190.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 2.5	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	C. 2.6	(4.201.924.738,00)	(3.986.736.189,00)
Jumlah Aset Tetap		65.506.809.250,00	65.701.488.479,00
ASET LAINNYA	C. 3		
Aset Tak Berwujud	C. 3.1	0,00	0,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C. 3.2	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	C. 3.3	319.711.600,00	319.711.600,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 3.4	(319.711.600,00)	(319.711.600,00)
Jumlah Aset Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH ASET		65.506.809.250,00	65.701.488.479,00
Kewajiban Jangka Pendek	C. 4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 4.1	1.363.194,00	2.604.070,00
Utang Yang Belum Ditagihkan	C. 4.2	0,00	0,00
Hibah Langsung yang Belum Disahkan	C. 4.3	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C. 4.4	5.000.000,00	2.291.667,00
Uang Muka dari KPPN	C. 4.5	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C. 4.6	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		6.363.194,00	4.895.737,00
JUMLAH KEWAJIBAN		6.363.194,00	4.895.737,00
EKUITAS			
Ekuitas	C. 5	65.500.446.056,00	65.696.592.742,00
JUMLAH EKUITAS		65.500.446.056,00	65.696.592.742,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		65.506.809.250,00	65.701.488.479,00

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA	D. 1	2.291.667,00	208.333,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.291.667,00	208.333,00
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	3.212.208.305,00	2.978.823.681,00
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	47.058.385,00	49.035.468,00
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	998.659.361,00	1.003.865.252,00
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	391.761.290,00	356.478.020,00
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	22.136.612,00	35.014.000,00
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	213.258.479,00	249.924.477,00
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	D. 8	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		4.885.082.432,00	4.673.140.898,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(4.882.790.765,00)	(4.672.932.565,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 9	0,00	0,00
POS LUAR BIASA	D. 10	0,00	0,00
SURPLUS (DEFISIT) LO		(4.882.790.765,00)	(4.672.932.565,00)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	65.696.592.742,00	65.906.271.539,00
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	(4.882.790.765,00)	(4.672.932.565,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E. 3	0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		1.019.250,00	(6.845.495,00)
Penyesuaian Nilai Aset	E. 4.1	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4.2	0,00	0,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E. 4.3	0,00	11.979.000,00
Selisih Revaluasi Aset	E. 4.4	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E. 4.5	1.019.250,00	(18.824.495,00)
Lain-lain	E. 4.6	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 5	4.685.624.829,00	4.470.099.263,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(196.146.686,00)	(209.678.797,00)
EKUITAS AKHIR	E. 6	65.500.446.056,00	65.696.592.742,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
	2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
	3.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
	4.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
	5.	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
	6.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
	7.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
	8.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014;
	9.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
	10.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
	11.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
	12.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
	13.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
	14.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 217/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
	15.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
	16.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Instansi;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
19. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
20. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2023 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
21. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
22. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 mengenai Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Militer III-12 Surabaya

*Profil dan
Kebijakan
Teknis
Pengadilan
Militer III-12
Surabaya*

Visi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah Terwujudnya Pengadilan Militer III-12 Surabaya Yang Agung. Visi Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut memberikan gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
2. Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
5. Peningkatan Kualitas Pengawasan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada instansi Pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satuan Kerja yang ada. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI menggunakan sistem *single entry point*, *single database*, *multi user* dan/atau multi Satuan Kerja, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, *unaudited*, dan *audited*.

SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja dimulai dari proses Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan sampai dengan Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut:

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen *Supplier* dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul

Pembayaran.

3. Proses pelaporan diperankan oleh modul Akuntansi dan Pelaporan.

SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A.4. Basis Akuntansi

Basis

Akuntansi

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Dasar

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Urusan Administrasi yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN);
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN;
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca;
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal;
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA;
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan

cara lainnya.

Aset tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun;
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar;
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya;
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan

Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap;
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan

kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat;
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya;
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi;

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi;
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas

bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2024 mendapatkan alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp4.869.715.000,00. Selama periode berjalan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber jenis belanja antara lain:

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	PER 31 DESEMBER 2024	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	0,00	0,00
Belanja		
Belanja Pegawai	4.717.369.000,00	3.379.769.000,00
Belanja Barang	1.433.084.000,00	1.471.964.000,00
Belanja Modal	0,00	17.982.000,00
Jumlah Belanja	6.150.453.000,00	4.869.715.000,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.000.000,00. Adapun rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	PER 31 DESEMBER 2024		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	0,00	5.000.000,00	0,00
4259	Pendapatan Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Bruto		0,00	5.000.000,00	0,00
Pengembalian		0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Netto		0,00	5.000.000,00	0,00

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bukan merupakan satuan kerja penghasil pendapatan namun dapat memperoleh pendapatan atau penerimaan Negara yang diperoleh per 31 Desember 2024 yang merupakan pendapatan sewa sebagian tanah untuk kantin.

Perbandingan realisasi PNBP 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBP Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

KODE	Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
425173	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0,00	0,00	0,00	0,00
4259	Pendapatan Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00	0,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00	0,00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00	0,00
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Bruto		5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
Pengembalian		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Netto		5.000.000,00	2500000,00	2.500.000,00	0,00

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada periode 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.690.624.829,00 atau 96,32% dari anggaran belanja sebesar Rp4.690.624.829,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2024 tersaji sebagai berikut :

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	3.379.769.000,00	3.213.565.581,00	95,08
52	Belanja Barang	1.471.964.000,00	1.459.499.248,00	99,15
53	Belanja Modal	17982000,00	17560000,00	0,00
Jumlah Belanja Transaksi Kas Bruto		4.869.715.000,00	4.690.624.829,00	96,32
Pengembalian		0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Transaksi Kas Netto		4.869.715.000,00	4.690.624.829,00	96,32

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja periode 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp235.394.316,00 atau sebesar 5,28% dibandingkan realisasi periode TA 2023. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni:

- Belanja Pegawai

Meningkatnya Belanja Pegawai yang direalisasikan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pemenuhan hak-hak pegawai berupa adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat beberapa PNS, kenaikan gaji PNS sebesar 8% dan kenaikan tunjangan jabatan Hakim di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

- Belanja Barang

Meningkatnya Belanja Barang untuk mendukung aktivitas perkantoran dan pemeliharaan atas aset yang dimiliki agar tetap dapat dalam kondisi baik sehingga pelayanan dan aktivitas perkantoran dapat berjalan dengan baik.

Perbandingan realisasi belanja periode 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
		TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	3.213.565.581,00	2.977.030.923,00	236.534.658,00	7,95
52	Belanja Barang	1.459.499.248,00	1.438.214.590,00	21.284.658,00	1,48
53	Belanja Modal	17.560.000,00	39.985.000,00	(22.425.000,00)	(56,08)
Jumlah Belanja Transaksi Kas		4.690.624.829,00	4.455.230.513,00	235.394.316,00	5,28

B.3 Belanja Pegawai

Belanja
Pegawai
Rp3.213.565.581,00

Realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.213.565.581,00 dan Rp2.977.030.923,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp236.534.658,00 atau 7,95% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2023. Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 2023*(dalam Rupiah)*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	597.492.200,00	533.999.360,00	63.492.840,00	11,89
Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.861,00	7.823,00	38,00	0,49
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	48.593.540,00	43.414.060,00	5.179.480,00	11,93
Belanja Tunj. Anak PNS	12.746.288,00	12.345.514,00	400.774,00	3,25
Belanja Tunj. Struktural PNS	40.320.000,00	36.000.000,00	4.320.000,00	12,00
Belanja Tunj. Fungsional PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunj. PPh PNS	3.853.442,00	675.495,00	3.177.947,00	470,46
Belanja Tunj. Beras PNS	33.385.620,00	34.254.660,00	(869.040,00)	(2,54)
Belanja Uang Makan PNS	97.022.000,00	99.011.000,00	(1.989.000,00)	(2,01)
Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Umum PNS	20.510.000,00	21.990.000,00	(1.480.000,00)	(6,73)
Belanja Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Anak PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Uang Makan PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	2.165.120.000,00	1.961.200.000,00	203.920.000,00	10,40
Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	194.515.429,00	234.133.233,00	(39.617.804,00)	(16,92)
Realisasi Belanja Bruto	3.213.566.380,00	2.977.031.145,00	236.535.235,00	7,95
Pengembalian	(799,00)	(222,00)	(577,00)	259,91
Realisasi Belanja Netto	3.213.565.581,00	2.977.030.923,00	236.534.658,00	7,95

Kenaikan realisasi belanja pegawai secara umum disebabkan oleh beberapa hal berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2024 tentang perubahan kesembilan belas atas Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil. Dalam aturan ini disebutkan bahwa per Januari 2024, gaji ASN naik sebesar 8 (delapan) persen untuk semua golongan.
2. Adanya kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat untuk beberapa PNS pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Adanya kenaikan tunjangan hakim sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung Tanggal 18 Oktober 2024.

B.4 Belanja Barang

Belanja Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing
Barang sebesar Rp1.459.499.248,00 dan Rp1.438.214.590,00. Realisasi Belanja Barang
Rp1.459.499.248,00 mengalami kenaikan sebesar Rp21.284.658,00 atau 1,48% dibandingkan dengan realisasi
8,00 Belanja Barang periode 31 Desember 2023.
 Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	785.229.040,00	812.221.918,00	(26.992.878,00)	(3,32)
Belanja Barang Non Operasional	0,00	3.400.000,00	(3.400.000,00)	(100,00)
Belanja Barang Persediaan	60.375.375,00	60.075.088,00	300.287,00	0,50
Belanja Jasa	213.313.921,00	182.065.184,00	31.248.737,00	17,16
Belanja Pemeliharaan	378.444.300,00	345.438.400,00	33.005.900,00	9,55
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	22.136.612,00	35.014.000,00	(12.877.388,00)	(36,78)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Bruto	1.459.499.248,00	1.438.214.590,00	21.284.658,00	1,48
Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Netto	1.459.499.248,00	1.438.214.590,00	21.284.658,00	1,48

Kenaikan realisasi Belanja Barang disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

1. Pembayaran bantuan sewa rumah dinas hakim dikarenakan adanya penambahan jumlah hakim;
2. Meningkatnya pemeliharaan atas aset yang dimiliki agar tetap dalam keadaan baik untuk memberikan pelayanan dan kinerja yang optimal;

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah
Rp17.560.000,00 masing-masing sebesar Rp17.560.000,00 dan Rp39.985.000,00. Belanja Modal
0 merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang
 memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.560.000,00	39.985.000,00	(22.425.000,00)	(56,08)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Bruto	17.560.000,00	39.985.000,00	(22.425.000,00)	(56,08)
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	17.560.000,00	39.985.000,00	(22.425.000,00)	(56,08)

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp17.560.000,00 dan Rp39.985.000,00. Terdapat penurunan atas realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibandingkan dengan periode 31 Desember 2023.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.560.000,00	39.985.000,00	(22.425.000,00)	(56,08)
Realisasi Belanja Bruto	17.560.000,00	39.985.000,00	(22.425.000,00)	(56,08)
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	17.560.000,00	39.985.000,00	(22.425.000,00)	(56,08)

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak mendapatkan alokasi anggaran belanja modal gedung dan bangunan.

Rp0,00 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
Realisasi Belanja Bruto	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengembalian	0.00	0.00	0.00	0.00
Realisasi Belanja Netto	0.00	0.00	0.00	0.00

B.5.3 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak mendapatkan alokasi anggaran belanja modal lainnya.

Rincian Belanja Modal Lainnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
Belanja Modal Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Realisasi Belanja Bruto	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengembalian	0.00	0.00	0.00	0.00
Realisasi Belanja Netto	0.00	0.00	0.00	0.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar Jumlah Aset Lancar Satuan Kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya per 31 Desember
Rp0,00 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
Bendahara adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas
Pengeluaran yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran
Rp0,00 yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 11. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Saldo UP	0,00	0,00
2	Kwitansi UP belum di SPJ-kan	0,00	0,00
3	Saldo TUP	0,00	0,00
4	Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan
Setara Kas berasal dari UP/TUP, Kas Lainnya dan Setara Kas. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek
Rp0,00 yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Tabel 12. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Belanja yang masih harus dibayar/utang pihak ketiga yang masih berada di rekening bank bendahara	0,00	0,00
2	Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

C.1.3. Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Belanja Dibayar Dimuka Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00.

(Prepaid) Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran Tahun Anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rp0,00

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada 31 Desember 2023 merupakan pembayaran dimuka atas barang/jasa berupa sewa kendaraan dinas yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah.

Tabel 13. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No	Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Pembayaran Sewa Kendaraan Dinas (PT. Serasi Autoraya)	0,00	0,00
2	Pembayaran Sewa Kendaraan Dinas (PT. Adi Sarana Armada Tbk)	0,00	0,00
3	Pembayaran Sewa Kendaraan Dinas (PT. Primajaya Kurnia Cahaya Mandiri)	0,00	0,00
JUMLAH		0	0

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00.

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan Pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir Tahun Anggaran per tanggal pelaporan.

C.1.5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Rp0,00. Bagian Lancar berasal dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00. Bagian Lancar Tagihan TGR merupakan Tagihan TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih– Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Rp0,00 Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar (Rp0,00)..

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Tabel 14. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No.	Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	-	-	-	-	-

C.1.8. Persediaan

Persediaan Rp0,00 Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 15. Rincian Persediaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	Mutasi	31 Desember 2023
1	Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap Nilai Aset Tetap Pengadilan Militer III-12 Surabaya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp65.506.809.250,00 dan Rp65.701.488.479,00. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Badan Urusan Administrasi berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

C.2.1. Tanah

Tanah Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Militer III-12 Surabaya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp61.585.708.259,00. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada Tahun 2024.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 16. Mutasi Transaksi Tanah

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	61.585.708.259,00
-	
Mutasi tambah:	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	61.585.708.259,00

Tabel 17. Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2024

JENIS BMN	NUP	TANAH MILIK SENDIRI			LUAS TANAH (m2)	NILAI PEROLEHAN
		NO DAN TANGGAL SERTIFIKAT	ALAMAT LOKASI TANAH	KEPEMILIKAN ATAS NAMA		
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	Nomor Sertifikat 00053	Jl. Ir. H. Juanda 85 Sidoarjo	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI	3,539	46,445,128,259.00
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Hak Pakai No.12	Desa Sedati Agung	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI	1,974	15,140,580,000.00
Jumlah Halaman I					5,513	61,585,708,259.00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp3.665.182.729,00 Rp3.644.673.409,00.

Rp3.665.182.729,00 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

9,00

Tabel 18. Mutasi Transaksi Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	3.644.673.409,00
Transfer Masuk	0,00
Hibah Masuk	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
Transfer Keluar	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	3.665.182.729,00
Akumulasi Penyusutan	(3.462.106.525,00)
Nilai Buku	203.076.204,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp4.457.653.000.

Rp4.457.653.000,00 Tidak terdapat mutasi nilai Gedung dan Bangunan pada periode Tahun 2024. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 19. Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	4.457.653.000,00
Pembelian	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00
Transfer Masuk	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
Transfer Keluar	0,00
Reklasifikasi Keluar	0,00
Koreksi Pencatatan	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	4.457.653.000,00
Akumulasi Penyusutan	(739.818.213,00)
Nilai Buku	3.717.834.787,00

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah
Lainnya Rp190.000,00.
Rp190.000,00 Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang Aset Tetap Lainnya pada periode Tahun 2024.

Tabel 20. Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	190.000,00
-	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
-	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	190.000,00
Akumulasi Penyusutan	0,00
Nilai Buku	190.000,00

C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
Dalam adalah masing-masing Rp0,00.
Pengerjaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak memiliki konstruksi dalam pengerjaan pada
Rp0,00 periode Tahun 2024.

Tabel 14. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	0,00
Perolehan KDP	0,00
Pengembangan KDP	0,00
Perolehan Lainnya KDP	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
-	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	0,00

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
Penyusutan Aset adalah masing-masing (Rp4.201.924.738,00) dan (Rp3.986.736.189,00).
Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan
(Rp4.201.924.738,00) berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 15. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.665.182.729,00	(3.462.106.525,00)	203.076.204,00
2	Gedung dan Bangunan	4.457.653.000,00	(739.818.213,00)	3.717.834.787,00
3	Aset Tetap Lainnya	190.000,00	0,00	190.000,00
Jumlah		8.123.025.729,00	(4.201.924.738,00)	3.921.100.991,00

C.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp0,00

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Badan Urusan Administrasi terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak
Berwujud
Rp0,00

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Tabel 16. Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	0,00
-	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
-	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	0,00
Akumulasi Amortisasi	0,00
Nilai Buku	0,00

C.3.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang
Dibatasi
Penggunaannya
Rp0,00

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0,00.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan Kas yang dibatasi penggunaannya pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan atau kurang dari 12 bulan yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga yang diklasifikasikan dan diakui sebagai Aset lainnya. Pencatatan Dana yang Dibatasi Penggunaannya untuk pengeluaran belanja yang belum diterima pekerjaannya sampai dengan Tahun Anggaran berakhir menggunakan mekanisme RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran).

Mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih

aman, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Pembayaran/pencairan dana kepada penyedia barang/jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima.

C.3.3. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember Tahun 2023 adalah Rp319.711.600,00

00 Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang Aset Lain-lain pada periode Tahun 2024.

Tabel 17. Mutasi Aset Lain-Lain

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	319.711.600,00
-	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
-	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	319.711.600,00
Akumulasi Penyusutan	(319.711.600,00)
Nilai Buku	0,00

C.3.4. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Penyusutan dan adalah masing-masing (Rp319.711.600,00). Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan

Amortisasi Aset kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian

Lainnya nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rangkuman

(Rp319.711.600,00) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di

00) bawah.

Tabel 25. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
2	Aset Lain-Lain	319.711.600,00	(319.711.600,00)	0,00
Jumlah		319.711.600,00	(319.711.600,00)	0,00

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp6.363.194,00 dan Rp4.895.737,00.

Rp6.363.194,00 Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang yang Belum Ditagihkan, Pendapatan Diterima Dimuka, Uang Muka dari KPPN, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember Tahun 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.363.194,00 dan Rp2.604.070,00

Rp1.363.194,00 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Tabel 26. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai YMHD	435.482,00	Pembayaran belanja yang akan diajukan SPM pada Tahun Anggaran berikutnya
2	Belanja Barang YMHD	927.712,00	
3	Pengeluaran Transito YMHD	0,00	
4	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	0,00	
Jumlah		1.363.194,00	

C.4.2. Utang yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

Rp0,00 Utang yang belum diterima tagihannya sebesar Rp14.680.124,00 berasal dari:

1. Belanja yang sudah tercatat BAST pada Modul Komitmen tetapi belum terbit SP2D atas belanja tersebut sampai dengan periode pelaporan;
2. Pencatatan SPP atas Belanja Pegawai/Barang/Modal pada Modul Pembayaran tetapi belum terbit SPM/SP2D sampai dengan periode pelaporan.

C.4.3. Hibah yang Belum Disahkan

Hibah yang Belum Disahkan Hibah yang Belum Disahkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

Hibah yang Belum Disahkan adalah hibah atau pemberian tanpa klausul syarat yang mengikat dari pihak ketiga kepada Pemerintah namun belum terbit pengesahan hibah langsung sampai dengan tanggal pelaporan.

C.4.4. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima Dimuka Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp5.000.000,00 dan Rp2.291.667,00.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK.

Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari pendapatan sewa tanah/gedung yang jangka waktu kontraknya selama satu tahun. Saldo nihil karena telah dilakukan jurnal balik awal tahun.

Tabel 27. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	Jumlah
1	Sewa Tanah untuk Kantin	5.000.000,00
Jumlah		5.000.000,00

C.4.5. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp0,00

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal pelaporan.

C.4.6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

Utang Jangka Pendek Lainnya berupa utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke Kas Negara hingga tanggal pelaporan.

C.5 Ekuitas

Ekuitas Rp65.500.446.056,00

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp65.500.446.056,00 dan Rp65.696.592.742,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp2.291.667,00 dan Rp208.333,00. *Rp2.291.667,00* Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 28. Perbandingan Rincian Pendapatan Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan PNB Lain				
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya				
1	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	2.291.667,00	208.333,00	0,00
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		2.291.667,00	208.333,00	0,00
Total		2.291.667,00	208.333,00	0,00

Pendapatan dari pengelolaan dan pemanfaatan BMN berasal dari sewa sebagian tanah yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya di Jalan Ir. H. Juanda No.85 Sidoarjo.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.212.208.305,00 dan Rp2.978.823.681,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bekerja di lingkungan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 29. Perbandingan Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 2023*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Gaji Pokok PNS	596.319.759,00	535.580.060,00	11,34
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	7.255,00	7.667,00	(5,37)
3	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	48.454.730,00	43.572.130,00	11,21
4	Beban Tunj. Anak PNS	12.700.070,00	12.399.436,00	2,42
5	Beban Tunj. Struktural PNS	40.320.000,00	36.000.000,00	12,00
6	Beban Tunj. Fungsional PNS	0,00	0,00	-
7	Beban Tunj. PPh PNS	3.853.442,00	675.495,00	470,46
8	Beban Tunj. Beras PNS	33.385.620,00	34.254.660,00	(2,54)
9	Beban Uang Makan PNS	97.022.000,00	99.011.000,00	(2,01)
10	Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar	0,00	0,00	-
11	Beban Tunjangan Umum PNS	20.510.000,00	21.990.000,00	(6,73)
12	Beban Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	0,00	0,00	0,00
13	Beban Gaji Pokok PPPK	0,00	0,00	0,00
14	Beban Pembulatan Gaji PPPK	0,00	0,00	0,00
15	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	0,00	0,00	0,00
16	Beban Tunjangan Anak PPPK	0,00	0,00	0,00
17	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	0,00	0,00	0,00
18	Beban Tunjangan Beras PPPK	0,00	0,00	0,00
19	Beban Uang Makan PPPK	0,00	0,00	0,00
20	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0,00	0,00	0,00
22	Beban Tunj. Fungsional TNI/POLRI	2.165.120.000,00	1.961.200.000,00	10,40
23	Beban Tunj. PPh TNI/POLRI	194.515.429,00	234.133.233,00	(16,92)
Total		3.212.208.305,00	2.978.823.681,00	7,83

Terdapat kenaikan beban pegawai pada periode Tahun 2024 sebesar 7,83% yang secara umum disebabkan oleh kenaikan gaji PNS sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS yang berisi kenaikan gaji pokok PNS sebesar 8% untuk semua golongan dan kenaikan tunjangan hakim sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung. Beban Pegawai berasal dari SPM Gaji Desember 2024 dimana SP2D tercatat pada Bulan Januari 2025 namun Beban Pegawai telah diakui di LO pada saat pencatatan SPM di periode pelaporan.

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp47.058.385,00 Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp47.058.385,00 dan Rp49.035.468,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,03%.

Tabel 18. Perbandingan Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	47.058.385,00	49.035.468,00	(4,03)
Total		47.058.385,00	49.035.468,00	(4,03)

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp998.659.361,00 dan Rp1.003.865.252,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 19. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Keperluan Perkantoran	725.542.400,00	720.653.168,00	0,68
2	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.987.840,00	7.577.000,00	(7,78)
3	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	48.072.000,00	82.044.000,00	(41,41)
4	Beban Barang Operasional Lainnya	4.626.800,00	1.947.750,00	137,55
5	Beban Bahan	0,00	0,00	0,00
6	Beban Honor Output Kegiatan	0,00	0,00	0,00
7	Beban Barang Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
8	Beban Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00
9	Beban Langganan Telepon	928.741,00	988.704,00	(6,06)
10	Beban Langganan Air	7.334.580,00	8.105.880,00	(9,52)
11	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00
12	Beban Jasa Konsultan	0,00	0,00	0,00
13	Beban Sewa	205.167.000,00	175.158.750,00	17,13
14	Beban Jasa Profesi	0,00	0,00	0,00
15	Beban Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00
16	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
17	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0,00	7.390.000,00	(100,00)
Total		998.659.361,00	1.003.865.252,00	(0,52)

Kenaikan beban barang dan jasa pada periode Tahun 2024 sebesar (0,52%) disebabkan oleh beberapa hal, seperti:

1. Penurunan signifikan pada pos beban honor operasional satuan kerja pada TA 2024 Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikarenakan kebijakan dari Kementerian Keuangan atas pemotongan besaran honor pengelola keuangan tahun 2024.
2. Tidak adanya beban aset ekstrakomtabel untuk tahun 2024.

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp391.761.290,00 dan Rp356.478.020,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	196.697.520,00	193.036.400,00	1,90
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	181.746.780,00	152.402.000,00	19,25
4	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	13.316.990,00	11.039.620,00	20,63
Total		391.761.290,00	356.478.020,00	9,90

Terdapat kenaikan beban pemeliharaan pada periode Tahun 2024 sebesar 9,9% yang secara umum disebabkan oleh peningkatan keseluruhan pelaksanaan pemeliharaan baik pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin serta persediaan untuk pemeliharaan. Hal ini dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan pada awal tahun.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp22.136.612,00 dan Rp35.014.000,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 21. Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Biasa	20.036.612,00	34.714.000,00	(42,28)
2	Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	2.100.000,00	300.000,00	600,00
Total		22.136.612,00	35.014.000,00	(36,78)

Terdapat penurunan beban perjalanan dinas pada periode Tahun 2024 sebesar (36,78)%. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya frekuensi kegiatan perjalanan dinas yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Beberapa kegiatan perjalanan dinas dibebankan pada unit kerja Eselon I dan Eselon II.

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp213.258.479,00 dan Rp249.924.477,00. Beban Penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode Semester I Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 22. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	114.116.218,00	150.782.216,00	(24,32)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	99.142.261,00	99.142.261,00	0,00
3	Beban Penyusutan Jalan Irigasi	0,00	0,00	0,00
4	Beban Penyusutan Jaringan	0,00	0,00	0,00
5	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penyusutan		213.258.479,00	249.924.477,00	(14,67)
1	Beban Amortisasi Software	0,00	0,00	0,00
2	Beban Amortisasi Lisensi	0,00	0,00	0,00
Jumlah Amortisasi		0,00	0,00	0,00
1	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0,00	0,00	0,00
Total		213.258.479,00	249.924.477,00	(14,67)

Beban penyusutan dan amortisasi pada periode pelaporan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar (14,67)%. Penurunan ini disebabkan karena meningkatkan beban pemeliharaan untuk aset peralatan dan mesin.

0	D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
<i>Beban</i>	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi
<i>Penyisihan</i>	ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak
<i>Piutang Tak</i>	Tertagih untuk periode yang berakhir pada TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing
<i>Tertagih Rp0,00</i>	sebesar Rp0,00.

Tabel 35. Rincian Beban Piutang tak Tertagih Per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNPB	0,00	0,00	0,00
2	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

	D.9 Kegiatan Non Operasional
<i>Kegiatan Non</i>	Pos Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak
<i>Operasional</i>	rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non
<i>Rp0,00</i>	Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 36. Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Pelepasan Aset	0.00	0.00	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0.00	0.00	0.00
1	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0.00	0.00	0.00
2	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0.00	0.00	0.00
3	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0.00	0.00	0.00
4	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0.00	0.00	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0.00	0.00	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0.00	0.00	0.00

	D.10 Pos Luar Biasa
<i>Pos Luar Biasa</i>	Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak
<i>Rp0,00</i>	dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa pada 31 Desember 2024 dan 2023.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar
Rp65.696.592.742,00 Rp65.696.592.742,00 dan Rp65.906.271.539,00.
42,00

E.2 Surplus/Defisit LO

Defisit LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah
(Rp4.882.790.765,00) defisit sebesar (Rp4.882.790.765,00) dan (Rp4.672.932.565,00). Defisit LO merupakan
5,00) penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non
operasional dan kejadian luar biasa.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dampak Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode
Kumulatif yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00.
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi
Rp0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023
Nilai Aset adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian
Rp0,00 nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan
Persediaan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
Rp0,00 Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023
adalah sebesar Rp0,00.

E.4.3 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi yang timbul akibat adanya pencatatan
Reklasifikasi reklasifikasi Aset Tetap/Lainnya karena kesalahan pemilihan kodefikasi Aset
Rp0,00 Tetap/Lainnya pada masa lampau. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp11.979.000,00.

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00.

E.4.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.019.250,00 dan (Rp18.824.495,00). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.4.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,00.

Tabel 37. Rincian Koreksi Lainnya*(dalam Rupiah)*

No.	Keterangan	Nilai Piutang Audited 2023	Nilai Piutang Seharusnya	Koreksi Lainnya
1		-	-	-
Total		-	-	-

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Nilai transaksi antar entitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.685.624.829,00 dan Rp4.470.099.263,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Tabel 38. Rincian Transaksi Antar Entitas*(dalam Rupiah)*

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.685.624.829,00
Diterima dari Entitas Lain	0,00
Transfer Keluar	0,00
Transfer Masuk	0,00
Pengesahan Hibah Langsung	0,00
JUMLAH	4.685.624.829,00

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp0,00 sedangkan DKEL sebesar Rp4.685.624.829,00.

E.5.2 Transfer Keluar dan Transfer Masuk

Transfer Keluar dan Transfer Masuk merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, Transfer Keluar sebesar Rp0,00 sedangkan Transfer Masuk sebesar Rp0,00.

Tabel 39. Rincian Transfer Keluar*(dalam Rupiah)*

No.	Jenis	Transfer Keluar
1	Peralatan dan Mesin	0,00
2	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00
3	Gedung dan Bangunan	0,00
4	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00
Jumlah		0,00

Tabel 40. Rincian Transfer Masuk*(dalam Rupiah)*

No.	Jenis	Transfer Masuk
1	Peralatan dan Mesin	0,00
2	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00
3	Gedung dan Bangunan	0,00
4	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00
Jumlah		0,00

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp0,00.

E.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp65.500.446.056,00 dan Rp65.696.592.742,00.

56,00

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca pada satuan kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2024.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Selama periode Tahun Anggaran 2024, di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak dilaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga tidak dapat diungkapkan mengenai temuan dan tindak lanjut temuan BPK. Audit Kinerja Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan (BAWAS) Mahkamah Agung RI tanggal 13 s.d 16 Agustus 2024 tidak terdapat temuan signifikan yang memerlukan tindak lanjut.

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

- 1) Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah Rekening Virtual BRI Cabang Waru dengan Nomor *Virtual Account* 653256633141000 a.n BPG 135 DILMIL III-12 SBY yang digunakan sebagai penampung DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.
- 2) Revisi DIPA
DIPA pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor: Nomor SP DIPA-005.01.2.663314/2024 tanggal 24 November 2023 berjumlah sebesar Rp6.150.453.000,00 (enam milyar seratus lima puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. DIPA Awal

PROGRAM	AKUN	DIPA AWAL (Rp)
6986.EBA.994	511111	864.922.000,00
	511119	19.000,00
	511121	46.526.000,00
	511122	12.426.000,00
	511123	40.320.000,00
	511125	383.690.000,00
	511126	35.350.000,00

	511129	224.664.000,00
	511151	23.276.000,00
	511224	2.776.440.000,00
	511225	309.736.000,00
A	521111	481.603.000,00
	521119	1.000.000,00
	521811	60.440.000,00
B	521111	214.200.000,00
	521114	18.000.000,00
	522112	6.000.000,00
	522113	6.000.000,00
	522141	10.800.000,00
C	523111	197.568.000,00
E	523121	177.831.000,00
F	521111	24.225.000,00
	521115	48.072.000,00
G	524111	24.000.000,00
H	524113	1.500.000,00
I	521119	6.325.000,00
J	522141	155.520.000,00
JUMLAH PAGU		6.150.453.000,00

b. Revisi DIPA ke-1 tanggal 20 Februari 2024 (Tidak terdapat perubahan pagu)

PROGRAM	AKUN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)
6986.EBA.994	511111	864.922.000,00	864.922.000,00
	511119	19.000,00	19.000,00
	511121	46.526.000,00	46.526.000,00
	511122	12.426.000,00	12.426.000,00
	511123	40.320.000,00	40.320.000,00
	511125	383.690.000,00	383.690.000,00
	511126	35.350.000,00	35.350.000,00
	511129	224.664.000,00	224.664.000,00

	511151	23.276.000,00	23.276.000,00
	511224	2.776.440.000,00	2.776.440.000,00
	511225	309.736.000,00	309.736.000,00
A	521111	481.603.000,00	481.603.000,00
	521119	1.000.000,00	1.000.000,00
	521811	60.440.000,00	60.440.000,00
B	521111	214.200.000,00	214.200.000,00
	521114	18.000.000,00	18.000.000,00
	522112	6.000.000,00	6.000.000,00
	522113	6.000.000,00	6.000.000,00
	522141	10.800.000,00	10.800.000,00
C	523111	197.568.000,00	197.568.000,00
E	523121	177.831.000,00	177.831.000,00
F	521111	24.225.000,00	24.225.000,00
	521115	48.072.000,00	48.072.000,00
G	524111	24.000.000,00	24.000.000,00
H	524113	1.500.000,00	1.500.000,00
I	521119	6.325.000,00	6.325.000,00
J	522141	155.520.000,00	155.520.000,00
JUMLAH		6.150.453.000,00	6.150.453.000,00

c. Revisi DIPA ke-2 tanggal 23 April 2024 (Tidak terdapat perubahan pagu)

PROGRAM	AKUN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)
6986.EBA.994	511111	864.922.000,00	864.922.000,00
	511119	19.000,00	19.000,00
	511121	46.526.000,00	46.526.000,00
	511122	12.426.000,00	12.426.000,00
	511123	40.320.000,00	40.320.000,00
	511125	383.690.000,00	383.690.000,00
	511126	35.350.000,00	35.350.000,00
	511129	224.664.000,00	224.664.000,00
	511151	23.276.000,00	23.276.000,00

	511224	2.776.440.000,00	2.776.440.000,00
	511225	309.736.000,00	309.736.000,00
A	521111	481.603.000,00	481.603.000,00
	521119	1.000.000,00	1.000.000,00
	521811	60.440.000,00	60.440.000,00
B	521111	214.200.000,00	214.200.000,00
	521114	18.000.000,00	18.000.000,00
	522112	6.000.000,00	6.000.000,00
	522113	6.000.000,00	6.000.000,00
	522141	10.800.000,00	10.800.000,00
C	523111	197.568.000,00	197.568.000,00
E	523121	177.831.000,00	177.831.000,00
F	521111	24.225.000,00	24.225.000,00
	521115	48.072.000,00	48.072.000,00
G	524111	24.000.000,00	24.000.000,00
H	524113	1.500.000,00	1.500.000,00
I	521119	6.325.000,00	6.325.000,00
J	522141	155.520.000,00	155.520.000,00
JUMLAH		6.150.453.000,00	6.150.453.000,00

d. Revisi DIPA ke-3 tanggal 07 Juni 2024 (Terdapat perubahan pagu)

PROGRAM	AKUN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)
6986.EBA.994	511111	864.922.000,00	864.922.000,00
	511119	19.000,00	19.000,00
	511121	46.526.000,00	46.526.000,00
	511122	12.426.000,00	12.426.000,00
	511123	40.320.000,00	40.320.000,00
	511125	383.690.000,00	7.340.000,00
	511126	35.350.000,00	35.350.000,00
	511129	224.664.000,00	105.614.000,00
	511151	23.276.000,00	23.276.000,00
	511224	2.776.440.000,00	2.271.840.000,00

	511225	309.736.000,00	309.736.000,00
A	521111	481.603.000,00	481.603.000,00
	521119	1.000.000,00	1.000.000,00
	521811	60.440.000,00	60.440.000,00
B	521111	214.200.000,00	214.200.000,00
	521114	18.000.000,00	18.000.000,00
	522112	6.000.000,00	6.000.000,00
	522113	6.000.000,00	6.000.000,00
	522141	10.800.000,00	10.800.000,00
C	523111	197.568.000,00	197.568.000,00
E	523121	177.831.000,00	177.831.000,00
F	521111	24.225.000,00	24.225.000,00
	521115	48.072.000,00	48.072.000,00
G	524111	24.000.000,00	24.000.000,00
H	524113	1.500.000,00	1.500.000,00
I	521119	6.325.000,00	6.325.000,00
J	522141	155.520.000,00	181.440.000,00
JUMLAH		6.150.453.000,00	5.176.373.000,00

e. Revisi DIPA ke-4 tanggal 11 Juli 2024 (Tidak terdapat perubahan pagu)

PROGRAM	AKUN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)
6986.EBA.994	511111	864.922.000,00	859.013.000,00
	511119	19.000,00	19.000,00
	511121	46.526.000,00	52.026.000,00
	511122	12.426.000,00	12.835.000,00
	511123	40.320.000,00	40.320.000,00
	511125	7.340.000,00	7.340.000,00
	511126	35.350.000,00	35.350.000,00
	511129	105.614.000,00	105.614.000,00
	511151	23.276.000,00	23.276.000,00
	511224	2.271.840.000,00	2.271.840.000,00
	511225	309.736.000,00	309.736.000,00

A	521111	481.603.000,00	486.475.000,00
	521119	1.000.000,00	1.000.000,00
	521811	60.440.000,00	60.440.000,00
B	521111	214.200.000,00	214.200.000,00
	521114	18.000.000,00	12.228.000,00
	522112	6.000.000,00	4.491.000,00
	522113	6.000.000,00	7.509.000,00
	522141	10.800.000,00	10.800.000,00
C	523111	197.568.000,00	197.568.000,00
E	523121	177.831.000,00	177.831.000,00
F	521111	24.225.000,00	24.225.000,00
	521115	48.072.000,00	48.072.000,00
G	524111	24.000.000,00	24.000.000,00
H	524113	1.500.000,00	2.400.000,00
I	521119	6.325.000,00	6.325.000,00
J	522141	181.440.000,00	181.440.000,00
JUMLAH		5.176.373.000,00	5.176.373.000,00

f. Revisi DIPA ke-5 tanggal 16 Oktober 2024 (Terdapat perubahan pagu)

PROGRAM	AKUN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)
6986.EBA.994	511111	859.013.000,00	859.013.000,00
	511119	19.000,00	19.000,00
	511121	52.026.000,00	52.026.000,00
	511122	12.835.000,00	12.835.000,00
	511123	40.320.000,00	40.320.000,00
	511125	7.340.000,00	7.340.000,00
	511126	35.350.000,00	35.350.000,00
	511129	105.614.000,00	105.614.000,00
	511151	23.276.000,00	23.276.000,00
	511224	2.271.840.000,00	2.271.840.000,00
	511225	309.736.000,00	309.736.000,00
A	521111	486.475.000,00	486.475.000,00

	521119	1.000.000,00	1.000.000,00
	521811	60.440.000,00	60.440.000,00
B	521111	214.200.000,00	214.200.000,00
	521114	12.228.000,00	12.228.000,00
	522112	4.491.000,00	4.491.000,00
	522113	7.509.000,00	7.509.000,00
	522141	10.800.000,00	10.800.000,00
C	523111	197.568.000,00	197.568.000,00
E	523121	177.831.000,00	177.831.000,00
F	521111	24.225.000,00	24.225.000,00
	521115	48.072.000,00	48.072.000,00
G	524111	24.000.000,00	24.000.000,00
H	524113	2.400.000,00	2.400.000,00
I	521119	6.325.000,00	6.325.000,00
J	522141	181.440.000,00	194.400.000,00
JUMLAH		5.176.373.000,00	5.189.333.000,00

g. Revisi DIPA ke-6 tanggal 04 November 2024 (Terdapat perubahan pagu)

PROGRAM	AKUN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)
6986.EBA.994	511111	859.013.000,00	859.013.000,00
	511119	19.000,00	19.000,00
	511121	52.026.000,00	52.026.000,00
	511122	12.835.000,00	12.835.000,00
	511123	40.320.000,00	40.320.000,00
	511125	7.340.000,00	7.340.000,00
	511126	35.350.000,00	35.350.000,00
	511129	105.614.000,00	105.614.000,00
	511151	23.276.000,00	23.276.000,00
	511224	2.271.840.000,00	2.271.840.000,00
	511225	309.736.000,00	309.736.000,00
A	521111	486.475.000,00	487.641.000,00
	521119	1.000.000,00	1.000.000,00

	521811	60.440.000,00	60.440.000,00
B	521111	214.200.000,00	214.200.000,00
	521114	12.228.000,00	6.996.000,00
	522112	4.491.000,00	1.200.000,00
	522113	7.509.000,00	8.400.000,00
	522141	10.800.000,00	10.800.000,00
C	523111	197.568.000,00	197.568.000,00
E	523121	177.831.000,00	184.297.000,00
F	521111	24.225.000,00	24.225.000,00
	521115	48.072.000,00	48.072.000,00
G	524111	24.000.000,00	24.000.000,00
H	524113	2.400.000,00	2.400.000,00
I	521119	6.325.000,00	6.325.000,00
J	522141	181.440.000,00	194.400.000,00
1071.EBB.951	532111	0,00	17,982.000,00
JUMLAH		5.176.373.000,00	5.207.315.000,00

h. Revisi DIPA ke-7 tanggal 04 Desember 2024 (Terdapat perubahan pagu)

PROGRAM	AKUN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)
6986.EBA.994	511111	859.013.000,00	600.700.000,00
	511119	19.000,00	19.000,00
	511121	52.026.000,00	52.026.000,00
	511122	12.835.000,00	12.835.000,00
	511123	40.320.000,00	40.320.000,00
	511125	7.340.000,00	7.340.000,00
	511126	35.350.000,00	35.350.000,00
	511129	105.614.000,00	105.614.000,00
	511151	23.276.000,00	23.276.000,00
	511224	2.271.840.000,00	2.271.840.000,00
	511225	309.736.000,00	230.449.000,00
A	521111	487.641.000,00	487.641.000,00
	521119	1.000.000,00	1.000.000,00

	521811	60.440.000,00	60.440.000,00
B	521111	214.200.000,00	214.200.000,00
	521114	6.996.000,00	6.996.000,00
	522112	1.200.000,00	1.200.000,00
	522113	8.400.000,00	8.400.000,00
	522141	10.800.000,00	10.800.000,00
C	523111	197.568.000,00	197.568.000,00
E	523121	184.297.000,00	184.297.000,00
F	521111	24.225.000,00	24.225.000,00
	521115	48.072.000,00	48.072.000,00
G	524111	24.000.000,00	24.000.000,00
H	524113	2.400.000,00	2.400.000,00
I	521119	6.325.000,00	6.325.000,00
J	522141	194.400.000,00	194.400.000,00
1071.EBB.951	532111	17,982.000,00	17,982.000,00
JUMLAH		5.207.315.000,00	4.869.715.000,00

3) Penjelasan terkait jurnal bantu pada menu Jurnal Penyesuaian Khusus pada SAKTI Tahun 2024 :

a. Pada tanggal 2 Januari 2024 terdapat jurnal balik akrual awal tahun atas:

- Belanja barang yang masih harus dibayar atas belanja langganan telepon dan langganan air;
- Belanja pegawai yang masih harus dibayar atas belanja gaji pokok PNS, belanja pembulatan gaji PNS, belanja tunj. suami/istri, dan belanja tunj. anak
- Pendapatan diterima di muka atas sewa kantin;

4) Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 1/SEK.W3.Mil01/KU1.1.1/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, sebagai berikut :

Jabatan Pengelola Keuangan

Nama

Kuasa Pengguna Anggaran : Firda Nuril Hanifah, S.Si., M.PSDM.
Pembina / 197804082006042001

Pejabat Pembuat Komitmen : Ainur Rofiq, S.E.
Penata Tk I / 197903172006041004

Pejabat Penandatanganan SPM : Melanti Puspara, S.E.

		Penata / 198405302006042002
Bendahara Pengeluaran	:	Norma Azurah, S.E.I.
		Penata Muda Tk I / 199605022020122014
PPABP	:	Setijo Utomo
		Penata Muda Tk I / 197003071994031002
Staf Pengelola Keuangan	:	Feri Afzudi
		Serka / 21130148940892
Staf Pengelola Keuangan	:	Dina Astari, A.Md.
		Pengatur / 199706162022032017

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Kementerian/Lembaga : (005) Mahkamah Agung RI
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Satuan Kerja : (663314) Pengadilan Militer III-12 Surabaya
 Program : (005.01.WA-2024) Program Dukungan Manajemen
 Lokasi : (0500) Jawa Timur

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WA.1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung								
EBB.951	Layanan Sarana Internal	17.982.000,00	17.560.000,00	97,65	4	4	Unit	100	Kegiatan telah selesai dilaksanakan dengan capaian sebesar 100% dan akumulasi RVRO sebanyak 4 unit

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN TAHUN 2024

WA.6986	Dukungan Manajemen Administrasi Keseekretariatan Pengadilan Tingkat Bandung dan Tingkat Pertama								
EBA.994	Layanan Perkantoran	4.851.733.000,00	4.673.065.628,00	96,32	1	1	Layanan	100	Seluruh kegiatan telah selesai dilaksanakan
	Sub Total	4.869.715.000,00	4.690.624.829,00	96,32					
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja	-	-	-					
	Total	4.869.715.000,00	4.690.624.829,00	96,32					

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN TAHUN 2024

LAMPIRAN A.1

TABEL PENYUSUTAN TAHUN 2024

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
131111	Tanah	5.513	61.585.708.259,00	0,00	0,00	0,00	61.585.708.259,00
20101	TANAH PERSIL	5.513	61.585.708.259,00	0,00	0,00	0,00	61.585.708.259,00
132111	Peralatan dan Mesin	491	3.644.673.409,00	(3.346.060237,00)	(55.321.459,00)	(3.401.381.696,00)	243.291.713,00
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7	438.850.000,00	(438.850.000,00)	0,00	(438.850.000,00)	0,00
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0,00	(1.698.750,00)	1.698.750,00	0,00	0,00
30501	ALAT KANTOR	84	327.470.160,00	(289.553.660,00)	(4.813.000,00)	(294.366.660,00)	33.103.500,00
30502	ALAT RUMAH TANGGA	289	1.146.871.735,00	(1.058.737.046,00)	(15.868.027,00)	(1.074.605.073,00)	72.266.662,00
30601	ALAT STUDIO	11	91.657.020,00	(53.319.546,00)	(6.128.382,00)	(59.447.928,00)	32.209.092,00
30602	ALAT KOMUNIKASI	1	24.915.000,00	(24.915.000,00)	0,00	(24.915.000,00)	0,00
30603	PERALATAN PEMANCAR	1	198.969.000,00	(198.969.000,00)	0,00	(198.969.000,00)	0,00
30701	ALAT KEDOKTERAN	6	8.226.350,00	(1.788.406,00)	(1.502.135,00)	(3.290.541,00)	4.935.809,00
31001	KOMPUTER UNIT	64	1.072.942.204,00	(955.863.139,00)	(26.227.415,00)	(982.090.554,00)	90.851.650,00
31002	PERALATAN KOMPUTER	28	334.771.940,00	(322.365.690,00)	(2.481.250,00)	(324.846.940,00)	9.925.000,00
133111	Gedung dan Bangunan	1	4.457.653.000,00	(640.675.952,00)	(49.571.130,00)	(690.247.082,00)	3.767.405.918,00
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	4.457.653.000,00	(640.675.952,00)	(49.571.130,00)	(690.247.082,00)	3.767.405.918,00
135121	Aset Tetap Lainnya	2	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	2	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
166112	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	63	319.711.600,00	(319.711.600,00)	0,00	(319.711.600,00)	0,00
30501	ALAT KANTOR	5	40.691.350,00	(40.691.350,00)	0,00	(40.691.350,00)	0,00
30502	ALAT RUMAH TANGGA	33	93.096.500,00	(93.096.500,00)	0,00	(93.096.500,00)	0,00
30601	ALAT STUDIO	12	39.170.100,00	(39.170.100,00)	0,00	(39.170.100,00)	0,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN TAHUN 2024

30602	ALAT KOMUNIKASI	2	7.100.000,00	(7.100.000,00)	0,00	(7.100.000,00)	0,00
31001	KOMPUTER UNIT	7	131.250.650,00	(131.250.650,00)	0,00	(131.250.650,00)	0,00
31002	PERALATAN KOMPUTER	4	8.403.000,00	(8.403.000,00)	0,00	(8.403.000,00)	0,00
J U M L A H		6.070	70.007.936.268,00	(4.306.447.789,00)	(104.892.589,00)	(4.411.340.378,00)	65.596.595.890,00

LAMPIRAN A.2

TABEL RINCIAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

TAHUN 2024

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D. 1 JANUARI 2024	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 31 Desember 2024
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI
1	2	3	4	5	6
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00



LAMPIRAN A.3
HIBAH
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
PER 31 Desember 2024

NO	NAMA PEMBERI HIBAH	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	SUDAH DISAHKAN	BELUM DISAHKAN	
						NILAI	KETERANGAN
1	-	Barang	-	0,00	-	0,00	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN MILITER III - 12 DI SURABAYA 663314

Tgl Data : 26/02/25 3:03 AM
Tgl Cetak : 26/02/25 10:58 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	5,000,000	5,000,000	0	0	2,500,000	(2,500,000)	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	5,000,000	5,000,000	0	0	2,500,000	(2,500,000)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	5,000,000	5,000,000	0	0	2,500,000	(2,500,000)	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	4,869,715,000	4,690,624,829	(179,090,171)	96.32	4,541,016,000	4,455,230,513	85,785,487	98.11
1. Belanja Pegawai	3,379,769,000	3,213,565,581	(166,203,419)	95.08	3,052,602,000	2,977,030,923	75,571,077	97.52
2. Belanja Barang	1,471,964,000	1,459,499,248	(12,464,752)	99.15	1,448,414,000	1,438,214,590	10,199,410	99.3
3. Belanja Modal	17,982,000	17,560,000	(422,000)	97.65	40,000,000	39,985,000	15,000	99.96
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN MILITER III - 12 DI SURABAYA 663314

Tgl Data : 26/02/25 3:03 AM
Tgl Cetak : 26/02/25 10:58 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	4,869,715,000	4,690,624,829	(179,090,171)	96.32	4,541,016,000	4,455,230,513	85,785,487	98.11
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Sidoarjo, 26 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

FIRDA NURIL HANIFAH, S.Si.,M.PSDM
NIP 197804082006042001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (663314) PENGADILAN MILITER III - 12 DI SURABAYA

Tgl Data : 26/02/25 3:03 AM
Tgl Cetak : 26/02/25 10:58 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,291,667	208,333	2,083,334	1,000.002
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2,291,667	208,333	2,083,334	1,000.002
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	2,291,667	208,333	2,083,334	1,000.002
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,212,208,305	2,978,823,681	233,384,624	7.835
Beban Persediaan	47,058,385	49,035,468	(1,977,083)	(4.032)
Beban Barang dan Jasa	998,659,361	1,003,865,252	(5,205,891)	(0.519)
Beban Pemeliharaan	391,761,290	356,478,020	35,283,270	9.898
Beban Perjalanan Dinas	22,136,612	35,014,000	(12,877,388)	(36.778)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (663314) PENGADILAN MILITER III - 12 DI SURABAYA

Tgl Data : 26/02/25 3:03 AM
Tgl Cetak : 26/02/25 10:58 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	213,258,479	249,924,477	(36,665,998)	(14.671)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	4,885,082,432	4,673,140,898	211,941,534	4.535
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,882,790,765)	(4,672,932,565)	(209,858,200)	4.491
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,882,790,765)	(4,672,932,565)	(209,858,200)	4.491
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,882,790,765)	(4,672,932,565)	(209,858,200)	4.491

Keterangan :
FINAL

Sidoarjo, 26 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

FIRDA NURIL HANIFAH, S.Si.,M.PSDM
NIP 197804082006042001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (663314) PENGADILAN MILITER III - 12 DI SURABAYA

Tgl Data : 26/02/25 6:23 AM
Tgl Cetak : 26/02/25 10:58 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	65,696,592,742	65,906,271,539	(209,678,797)	(0.32)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,882,790,765)	(4,672,932,565)	(209,858,200)	4.49
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	1,019,250	(6,845,495)	7,864,745	(114.89)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	11,979,000	(11,979,000)	(100)
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	1,019,250	(18,824,495)	19,843,745	(105.41)
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,685,624,829	4,470,099,263	215,525,566	4.82
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(196,146,686)	(209,678,797)	13,532,111	(6.45)
EKUITAS AKHIR	65,500,446,056	65,696,592,742	(196,146,686)	(0.3)

Keterangan :
FINAL

Sidoarjo, 26 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

FIRDA NURIL HANIFAH, S.Si.,M.PSDM
NIP 197804082006042001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (663314) PENGADILAN MILITER III - 12 DI SURABAYA

Tgl Data : 26/02/25 3:03 AM
Tgl Cetak : 26/02/25 10:58 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET TETAP				
Tanah	61,585,708,259	61,585,708,259	0	0.00
Peralatan dan Mesin	3,665,182,729	3,644,673,409	20,509,320	0.56
Gedung dan Bangunan	4,457,653,000	4,457,653,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	190,000	190,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,201,924,738)	(3,986,736,189)	(215,188,549)	5.40
JUMLAH ASET TETAP	65,506,809,250	65,701,488,479	(194,679,229)	(0.30)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	319,711,600	319,711,600	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(319,711,600)	(319,711,600)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	65,506,809,250	65,701,488,479	(194,679,229)	(0.30)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,363,194	2,604,070	(1,240,876)	(47.65)
Pendapatan Diterima Dimuka	5,000,000	2,291,667	2,708,333	118.18
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6,363,194	4,895,737	1,467,457	29.97
JUMLAH KEWAJIBAN	6,363,194	4,895,737	1,467,457	29.97
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	65,500,446,056	65,696,592,742	(196,146,686)	(0.30)
JUMLAH EKUITAS	65,500,446,056	65,696,592,742	(196,146,686)	(0.30)
JUMLAH EKUITAS	65,500,446,056	65,696,592,742	(196,146,686)	(0.30)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	65,506,809,250	65,701,488,479	(194,679,229)	(0.30)

Keterangan :
FINAL

Sidoarjo, 26 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

FIRDA NURIL HANIFAH, S.Si.,M.PSDM
NIP 197804082006042001



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 663314
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	4,869,715,000	4,869,715,000	0
2	Belanja	4,690,625,628	4,690,625,628	0
3	Pengembalian Belanja	-799	-799	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	5,000,000	5,000,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 31-JAN-25

